



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MENGHADIRKAN KEPALA BRGM, DIRUT PERUM PERHUTANI, DIRUT PT
INHUTANI I DAN DIRUT PT INHUTANI V**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 15 (lima belas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 6 September 2023
Waktu : Pukul 14.20 s.d. 16.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara : 1. RKA K/L Tahun 2024;
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.B.A/Kabag Set. Komisi IV DPR RI
Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI
30 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5 dari 11 orang Anggota
 - 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) H. Sunarna, S.E., M.Hum.
 - 3) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
 - 4) Maria Lestari, S.Pd.
 - 5) M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya
5 dari 9 orang Anggota
 - 1) Ir. Budhy Setiawan, M. Si.
 - 2) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.

- 3) Firman Soebayo, S.E., M.H.
- 4) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
- 5) Ravindra Airlangga, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6 dari 7 orang Anggota

- 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
- 2) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
- 3) Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
- 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
- 5) Ir. Dwita Ria Gunadi
- 6) Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
1 dari 6 orang Anggota

1. Ir. Abdullah Tuasikal

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3 dari 5 orang Anggota

1. H. Muhtarom, S.Sos.
2. Daniel Johan, S.E., M.M.
3. Edward Tanur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat
2 dari 5 orang Anggota

- 1) Dr. Suhardi Duka, M.M.
- 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota

- 1) Drh. H. Slamet
- 2) Prof. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
- 3) H. Johan Rosihan, S.T.
- 4) Saadiah Uluputty, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional
4 dari 4 orang Anggota

- 1) Dr. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
- 2) Haerudin, S.Ag., M.H.
- 3) Ir. Alimin Abdullah
- 4) Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Demokrat

- 1) Hj. Nur'aeni, S. Sos., M.Si.

C. Pemerintah:

1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);
5. Dr. Hanif Faishol, S. Hut., MP. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
6. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S. Hut., M.Agr.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
7. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
8. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari);
9. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
11. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
14. Drs. Ade Palguna Ruteka (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
15. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
16. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);

17. Dr. Ir Ayu Dewi Utari, M.Si. (Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
18. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
19. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
dan
20. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani,
Yang terhormat Direktur Utama PT Inhutani I-V,

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan jadwal acara Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang telah diputuskan dalam Rapat Pengganti Konsultasi Bamus 5 Juli 2023 dan keputusan Rapat Komisi IV tanggal 21 Agustus. Pada hari ini, Rabu Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan eh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menghadirkan Badan Restorasi Gambut, Perhutani, Inhutani dan lain-lain dalam rangka membahas:

1. RKA K/L 2024;
2. Usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. Saya rasa masalah DAK tidak perlu dijelaskan lagi karena dijelaskan hanya selintas karena kemarin rapat kerja pertama sudah dijelaskan, RDP sudah dijelaskan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) tentang Tata Tertib rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.20 WIB)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 14.20 menit dan akan diakhiri pada pukul, perlu jam berapa nih? Bungkus 16.00? kalau 15.00 *nggak* cukup, udah 15.30 lah. Karena kan sudah banyak yang dipertanyakan. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas Komisi dalam bidang anggaran, terkait pembahasan rencana undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) Komisi melakukan Rapat Kerja dengan pemerintah membahas alokasi anggaran untuk program kegiatan kementerian lembaga dan hasil pembahasan akan disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis.

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja hari ini adalah berdasarkan surat Badan Anggaran Nomor B/8607/AG.050701/2023 tanggal 12 Juli 2023 mengenai penyampaian rancangan jadwal pembahasan rencana undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2022 dan rancangan pembahasan rencana undang-undang tentang APBN 2024.

Sebagaimana telah disampaikan dalam kesempatan rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang lalu, RKA K/L tahun anggaran 2024, Komisi IV telah menyampaikan saran, masukan serta harapan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat memprioritaskan rencana kerja anggarannya untuk program-program yang diharapkan dapat meningkatkan sosial ekonomi kesejahteraan bagi masyarakat baik masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan maupun masyarakat yang terdampak penurunan kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dihadapkan melaksanakan program dan kegiatan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam hutan. Dalam rangka melaksanakan mitigasi dampak perubahan iklim serta pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan secara besar-besaran di beberapa wilayah di Indonesia sebagaimana yang terjadi pada tahun 2007 dan 2015 sebagai dampak dari fenomena El Nino yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023.

Dalam rapat dengar pendapat yang lalu dilaksanakan tanggal 5 September yang lalu, Komisi IV di antaranya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar:

1. Mengalokasikan seluruh tambahan pagu anggaran 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Sumber daya alam non migas untuk program berbasis masyarakat; serta
3. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi pada ekosistem mangrove kritis di seluruh Indonesia.

Untuk itu, dalam kesempatan rapat kerja hari ini, Komisi IV meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penjelasan secara detail mengenai hal-hal yang terjadi telah menjadi kesepakatan bersama dalam beberapa kesempatan rapat yang lalu.

Jadi, Ibu Menteri, saya ini pertama menyoroti masalah surat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Lingga sama Karimun yang mengeluarkan izin untuk, saya anggap pembabatan mangrove lah. Mungkin dalam kesempatan akan datang saya bersama Gakkum, bersama Anggota Komisi IV akan meninjau langsung. Karena waktu itu kita panggil, yang kami sayangkan karena mereka mungkin, mungkin mereka menganggap diri pejabat paling tinggi. Kami memanggil hanya ingin klarifikasi, tetapi mereka sangat-sangat sibuk tidak bisa datang. Lain kesempatan kami akan tetap memanggil lagi, antara lain: Bupati Kepulauan Lingga, Karimun, Walikota Batam *plus* Otorita Batam. Kami ingin minta penjelasan secara detail dan rinci.

Silakan, Bu Menteri menjelaskan agenda rapat kerja hari ini dan saya minta juga kepada Komisi IV Anggota yang sudah ditanyakan pada waktu rapat kerja maupun RDP saya rasa tidak perlu ditanyakan, tinggal nanti kalau memang kurang jelas diperjelas.

Satu lagi, Bu Menteri, saya memberikan apresiasi yang tinggi sekali, kunjungan kami bersama Bang Salim ke Banyuwangi, *eh* Bang Salim *nggak* ikut ya? oh Pak Budhy *ngikut*. Di sana pengelolaannya sangat baik sekali. Dan saya berharap Bu Menteri, saya berharap di semua taman nasional seperti itu keadaannya karena pengelolaannya sangat baik, hutannya sangat rimbun dan terjaga dengan baik.

Silakan, Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Terima kasih, Pak Ketua yang terhormat.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Shalom,
Om swastiastu,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,

Pertama, kami menyampaikan rasa syukur pada Tuhan dan terima kasih hari ini dapat kembali dilaksanakan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian LHK dan ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja pada tanggal 30 Agustus dan RDP pada tanggal 5 September.

Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota yang saya hormati,

Kami menyiapkan laporan tertulis dan mohon izin saya ingin menyampaikan secara ringkas. Pertama, berkenaan dengan RKA K/L APBN 2024 dan kemudian tentang DAK (Dana Alokasi Khusus).

Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota yang kami hormati,

Tentang RKA K/L 2024. Berkenaan dengan seperti telah kami laporkan terdahulu sasaran, target, dan kinerja mohon periksa pada halaman 7 sampai 13. Dan tentang rencana pendapatan DAK dan belanja pembiayaan selanjutnya mohon periksa pada halaman 14 hingga 18. Dan izinkan kami melaporkan pada halaman 19 berkenaan dengan komposisi pagu anggaran per unit kerja per sumber dana. Jadi, kami ingin melaporkan dan secara langsung menyebutkan alokasinya.

1. Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran Rp449.809.277.000,00;
2. Inspektorat Jenderal Rp73.672.711.000,00;
3. Direktorat Jenderal PHL Rp300.881.069.000,00;
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dengan pagu anggaran Rp1.357.357.741.000,00;
5. Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistem dengan pagu Rp1.748.497.174.000,00;
6. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan pagu Rp716.010.354.000,00;
7. Badan Standardisasi dan Instrumen LHK dengan pagu Rp273.769.882.000,00;
8. Badan BP2SDM dengan pagu anggaran Rp373.822.575.000,00;
9. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dengan pagu anggaran Rp311.465.933.000,00;
10. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dengan pagu anggaran Rp498.814.150.000,00;

11. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dengan pagu anggaran Rp353.834.443.000,00;
12. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan pagu anggaran Rp274.400.985.000,00;
13. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Kerusakan Lingkungan dengan pagu anggaran Rp595.299.740.000,00; dan
14. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dengan pagu anggaran Rp320.979.220.000,00.

Ibu dan Bapak Anggota, serta
Pimpinan Komisi IV DPR yang kami hormati,

Kami mohon terhadap usulan pagu anggaran ini kiranya mendapatkan perkenan persetujuan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Selanjutnya, pada halaman 21 sampai 24 itu tercatat uraian dalam kaitan dengan prioritas nasional. Dan izinkan kami kemudian melaporkan tentang indikasi sebaran kegiatan berbasis masyarakat untuk tahun 2024 yang secara rinci mohon periksa pada halaman 26 untuk 3 (tiga) Direktorat Jenderal dan halaman 27 untuk BP2SDM, PSKL, dan PSLB3, serta pada halaman 28 untuk Direktorat Jenderal BRGM, dan PPI, PPKL, dan BSI.

Ibu dan Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Saya mohon izin melaporkan dan sekaligus mohon dukungan Komisi IV DPR RI atas usulan penambahan pagu belanja PNBPN. Jadi, KLHK hari Kamis ya kalau *nggak* salah ya *eh* kemarin di undang rapat ya di Badan Anggaran tentang PNBPN dan kelihatannya ada penambahan target PNBPN dari 6,7 menjadi 7,1 triliun. Dan apabila ini kemudian berimplikasi kepada penambahan pembiayaan, jadi sesuai dengan hasil RDP dialokasikan untuk belanja masyarakat.

KETUA RAPAT:

Ya, seharusnya kalau sudah mencapai 119% *nggak* perlu kemudian ditambahkan lagi harus lebih lagi. Itu Sekjen kan saya yang suruh menghadap Pimpinan Banggar. Kalau *nggak* kan, *nggak*, kalau *nggak* ada komunikasi mereka mana mau membantu mengurus, iya kan. Kalau kami kan senang sekali makin banyak tambahan anggaran berarti Polhutnya pakai baju baru, sepatu baru, gitu aja.

Silakan lanjutkan, Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Terima kasih, Pimpinan.

Dan selanjutnya saya mohon izin juga melaporkan bahwa terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka anggaran berbasis masyarakat ini, kami mohon dukungan untuk kita dapat meningkatkan komunikasi dan penguatan pelaksanaan kegiatan anggaran berbasis masyarakat ini untuk dapat cepat dilaksanakan.

Selanjutnya, kami mohon izin melaporkan tentang DAK bidang LHK. Seperti rapat-rapat yang lalu mengenai dasar hukum, tematik, dan siklus, serta prioritas. Mohon periksa pada halaman 32 hingga 39.

Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya mohon izin melaporkan bahwa pagu anggaran untuk DAK Fisik bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada *screen* 39 yaitu untuk pagu DAK bidang Kehutanan dengan tematik *food estate* senilai Rp34.500.000.000,00 dan pagu DAK untuk bidang tematik destinasi pariwisata prioritas yaitu sebesar Rp135.000.000.000,00 dengan sebaran lokasi pelaksanaannya di provinsi dan kabupaten pada halaman 40 dan 41.

Ibu dan Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota yang kami hormati,

Kami mohon kiranya pengawasan DAK bidang LHK kita dapat tingkatkan lagi dan kiranya juga mohon dukungan untuk kita bisa memperluas menu dana alokasi khusus bidang LHK, tidak hanya pada *food estate* dan destinasi wisata prioritas tetapi juga pada menu-menu lainnya.

Kemudian terkait dengan catatan terakhir dari yang terhormat Bapak Ketua, sehubungan dengan persoalan HTR di Provinsi Kepulauan Riau. Kami mendapat catatan teknis dari tim sejak Mei 2023 surat dari Gakkum, kemudian pembahasan-pembahasan pada bulan Juni dan sebetulnya sudah ada pemberian sanksi administratif terhadap 5 koperasi. Kemudian juga ada catatan-catatan dari Direktorat Jenderal PSKL.

Pak Ketua, kami mendukung untuk kita mengambil langkah-langkah dan menerapkan penegakkan hukum, pengawasan penegakan hukum dan penerapan sanksi untuk ini. Dan secara tertulis kami akan laporkan kembali sampai langkah-langkah rincinya.

Demikian Pimpinan, Ibu-Bapak Anggota yang kami hormati. Kurang lebih mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya.

Kami persilakan perwakilan fraksi untuk mengajukan pertanyaan, masukan, saran, dan lain-lain.

Silakan Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Ya. Jubir dari Fraksi Gerindra Pak Azikin Solthan, silakan.

F-P.GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam Indonesia Raya,

Yang terhormat Pimpinan Anggota Komisi IV,
Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Bapak Sekretaris Jenderal,
dan segenap Eselon I yang mendampingi hari ini,
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove beserta seluruh jajarannya,

Sehubungan dengan pembahasan materi Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Direktur Utama PT Inhutani I, Direktur Utama PT Inhutani V, bersama ini kami menyampaikan beberapa tanggapan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Kami mendukung rencana program dan anggaran DAK Fisik LHK tahun 2024 agar dapat direalisasikan dengan baik dan tepat sasaran dengan indikator-indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara kualitas, pembangunan, hukum, maupun serta moral kepada masyarakat yang lebih luas dan dapat dirasakan kemanfaatannya.
2. Dalam rangka mendukung kinerja utama LHK tahun 2024 yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Kami meminta Menteri LHK selanjutnya dan meningkatkan anggaran dan program-program kampanye

- lingkungan hidup dalam peningkatan kesadaran masyarakat secara konkret dan tepat sasaran sehingga pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan lestari dapat terwujud sebagaimana mestinya.
3. Kami juga menyarankan kepada Ibu Menteri agar pasca pemindahan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari Medan ke Aceh tetap, dari Medan ke Aceh tapi sampai saat ini belum, belum beroperasi secara maksimal. Mohon semua personil dan teknis administrasi, maupun taktis operasionalnya dapat dilaksanakan di Aceh.

Demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Selanjutnya, Pak Jubir dari Fraksi PDIP.

Silakan, Pak Ansi Lema dari Jubir PDIP.

F-PPDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,
Salam Pancasila,

Ibu Menteri yang saya hormati,
Pak Sekjen, para Eselon I, dan Bapak-Ibu hadirin sekalian yang hadir, dan
Teman-teman Komisi IV yang saya hormati,

Yang pertama, Bu Menteri terkait dengan izin pemanfaatan hutan kayu mangrove itu beberapa kali rapat itu masih menjadi catatan yang dikritisi oleh Komisi IV DPR RI, maka kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan atensi yang khusus terhadap hal ini. Dan mungkin perlu juga dievaluasi mengenai izin-izin yang diterbitkan oleh kepala daerah, karena terus terang Presiden Republik Indonesia punya *concern* yang sangat kuat terkait dengan hal ini namun di banyak tempat titik setidaknya yang Komisi IV datangi data yang kami terima itu menunjukkan bahwa terjadi perusakan.

Yang kedua, kami tentu mendukung berbagai program ataupun kerja-kerja konservasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan pelibatan masyarakat, pelaku ataupun juga pegiat konservasi disekitar wilayah konservasi perlu ada apresiasi Bu dan salah satu program yang kami lihat cukup baik itu adalah program misalnya Bang PeSoNa, Bu. *Nah*, terkait dengan hal ini mungkin kita bisa meningkatkan ya anggarannya karena itu kan

menyentuh langsung kepentingan dari masyarakat sekitar yang hidup di wilayah dekat dengan wilayah-wilayah konservasi.

Yang berikut, kami juga ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan sebaran lokasi DAK. Karena kami melihat terkait dengan daerah-daerah yang memiliki kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung yang cukup luas ini belum sepenuhnya mendapatkan DAK, Ibu, padahal DAK ini juga harus punya atensi dan keberpihakan kepada daerah-daerah yang memang dikelilingi oleh kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung ini, Bu.

Yang berikut, terkait dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan DAK tersebut. Ini terkait dengan pemulihan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah-wilayah ini, Bu.

Dan yang terakhir, kami membaca soal data laju deforestasi, Bu. Kalau sebelum-sebelumnya itu, laju deforestasi itu terjadi di Indonesia kawasan barat, hari-hari ini itu bergeser ke kawasan Indonesia bagian timur. Kami ingin mendapatkan konfirmasi soal data yang kami dapatkan ini, sekaligus penjelasan apa yang menjadi pangkal penyebab sehingga laju deforestasi di Indonesia bagian timur ini terjadi.

Untuk sementara itu, Pimpinan. Kami kembalikan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Selanjutnya Jubir dari Fraksi Golkar, Pak Salim Fakhry. Silakan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,
Bu Menteri, Pak Wamen, teman-teman Eselon I yang kami hormati,

Mendengar sajian Ibu Menteri pemaparannya kami dari Fraksi Golkar mendukung baik itu kegiatan untuk anggaran 2024 yang akan datang ataupun kegiatan sekarang. Senyum Pak Sudin.

Namun, menyahut tadi apa yang dikatakan Pak Ansi Lena, masalah sebaran. Ansi Lema, Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur. Menyangkut sebaran lokasi pelaksanaan DAK tahun 2024, kemarin pun dalam RDP dipertanyakan beberapa rekan-rekan. Kita ambil contoh Bu khusus untuk Aceh, dalam paparan Ibu sudah terlihat itu dapat Kota Sabang Bu, artinya kami sangat setuju. Namun, ini kan tidak menunjukkan apa yang dikatakan dari rekan PDIP partai yang saat ini berkuasa penuh di Republik Indonesia. Artinya, sementara daerah yang lain mempunyai hutan lindung yang luas, mempunyai Anggota DPR Dapil tersebut,

daerah tersebut, kenapa ini tidak dimasukkan. Kami ingin penjelasan dari Kementerian ataupun memang memasukkan ini aturan mana yang dipakai mungkin suka dan tidak suka, menyahut tadi dari teman kami.

Selanjutnya, yang mau kami pertanyakan lagi Bu. Masalah tindak lanjut kunjungan kerja spesifik, kalau saya tidak salah Pak Sudin, Pak Sudin akhir Januari kunjungan ke tambang batubara PT Mulia Persada Kartanegara, Kalimantan Timur, yang Pak Sudin naik excavator hampir jatuh waktu itu. Yang mau saya pertanyakan, bagaimana sudah progres pengajuan PPKH atas IUP PT tersebut. Yang kedua pelaksanaan kewajiban PPKH PT Mulia Persada Kartanegara tersebut sudah sampai di mana? Sudah itu, penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT tersebut sudah sampai di mana? ada beberapa ini saya persingkat saja.

Yang kedua, kunjungan kita ke PT Kedap Sayaaq antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang memakan waktu yang diikuti kalau *nggak* salah Pak Roy dari Gakkum ikut, termasuk Ibu Rosiyah ikut. Ini pun mau kami pertanyakan sampai di mana sudah. Apakah izinnya sudah di, dikeluarkan? apakah pajaknya yang dikatakan sekian ratus miliar sudah ada dibayar? Atau adakah yang lain-lain supaya kami mendapat penjelasan jangan ada dikira indikasi mohon maaf ada permainan dalam hal tersebut. Sebab kami mendengar setelah kunjungan kami setelah penyegelan, satu minggu ke depannya Duta Besar Korea datang ke lokasi atau datang ke Gakkum, saya pun *nggak* paham, cuma ini sekedar informasi. Kalau Ibu bayangkan perjalanan kami menempuh 26 jam itu, saya kira kami hampir lagi *speed boat* kami bertabrakan dengan tongkang, karena hujan yang lebat, Bu. Ini penjelasan-penjelasan ini kemarin pun kami pertanyakan, mohon kiranya melalui Ibu Menteri untuk bisa menjawab mungkin sekilas, kalau menjawab melalui tulisan kemarin pun melalui tulisan sampai hari ini tulisannya *nggak* ada.

Saya kira untuk sementara itu saja, Bapak Pimpinan.

Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Selanjutnya Pak Edward Tannur dari Fraksi PKB.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Selamat sore,

Pimpinan Komisi IV beserta para Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Ibu Menteri, Pak Wamen, sama Pak Sekjen dari KLHK beserta Eselon I yang hadir hari ini yang sama pula saya hormati,

Terima kasih banyak pemaparan yang tadi Ibu Menteri sudah sampaikan. Kami dari Fraksi PKB sedikit menyorot beberapa poin 3, 4. Jadi, yang singkat-singkat saja karena pembahasan sudah kita lalui.

Hari ini kita menegaskan saja bahwa kami juga sangat mendukung dengan adanya perkiraan PNBP dari KLHK yang ditargetkan meningkat 1 triliun lebih ya, ini mungkin satu apa satu, satu rencana yang baik karena terjadi peningkatan. Cuma yang kami perlu sampaikan agar produksi kayu bulat dalam memenuhi ekspor kayu olahan, kunjungan wisata alam, kunjungan kawasan hutan, ganti kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta denda administrasi bidang kehutanan ini betul-betul harus dijalankan secara baik sehingga target kita ini jangan sampai meleset. Ini targetnya meningkat 35,6% ini, cukup besar ini. Tadi Pak Ketua baru sampaikan bahwa pencapaian target kita PNBP 2023 kan 119%, ya ini memang luar biasa. Ya, mungkin dengan perhitungan-perhitungan ini, maka KLHK menargetkan lebih besar lagi.

Dua, mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim ini memang sangat menyulitkan kita dalam memprediksi kegiatan-kegiatan yang akan datang sebab intensitas bencana alam ini terus meningkat, kalau sekarang El Nino, nanti tidak lama lagi 3, 4 bulan lagi El Nina yang datang. Selama dunia ini masih berputar, siklus ini tidak akan *stop*, jadi saling bergantian dan ini perlu kita melakukan antisipasi secara baik karena resiko seperti yang kita ketahui bersama bahwa resiko baik dan buruknya pasti akan datang.

Yang ketiga, kami mengusulkan agar pengentasan kemiskinan terlebih di daerah-daerah sekitar kawasan hutan ini memang sangat besar ya jumlahnya daerah-daerah krusial. Kami mengusulkan kalau boleh Perhutanan Sosial itu lebih ditingkatkan dan juga TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria) kalau program itu ada, tapi terus terang Pak Sekjen, kami ditempat saya sedikit mengalami kesulitan untuk mengeksekusi TORA. Karena, di sana yang mengurus TORA ini kami sudah berulang-ulang kali minta datanya katanya sudah diusul, saya bilang mana datanya? Kalau kita hanya omong usul-usul saja, datanya tidak ada kan sama aja bohong ini. Ya, mudah-mudahan kalau nanti saya kembali lagi kalau bisa dapat datanya saya bawa untuk saya serahkan ke Pak Sekjen dan kepada KLH-KLH, Pak, itu mengenai TORA. Ini kan dalam rangka pengentasan kemiskinan, lebih cepat lebih baik, lebih awal lebih baik.

Dan juga mengenai program yang berbasis masyarakat juga untuk 2024 ini memang terjadi peningkatan yang luar biasa juga satu triliun ini, satu triliun lebih dan kami sangat setuju memang tujuan dari pembangunan adalah masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi, kalau program-program yang menasar langsung ke masyarakat luar biasa.

Jadi, ke depan kami harapkan di tahun 2024 pengelolaan KLHK bisa lebih baik lagi dan bisa lebih mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat banyak.

Terima kasih Pak Ketua, hanya ini yang dapat kami sampaikan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Ya, selanjutnya Pak Slamet dari Fraksi PKS.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota yang saya hormati,
Bu Menteri, Pak Wakil Menteri, dan seluruh jajarannya Eselon I dan juga semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Secara prinsip untuk anggaran Insya Allah apa sangat.... PKS menyetujui, hanya catatannya memang ya kemarin sudah dituangkan dalam kesimpulan, PNBP-nya cukup tinggi tetapi anggarannya tidak sebanding. *Nah*, sekarang tadi informasi dari Bu Menteri, targetnya ditambah. *Nah*, selayaknya kalau targetnya ditambah mestinya anggaran KLHK juga ditambah harusnya seperti itu ya.

Beberapa masukan, Bu, rasa-rasanya dalam rangka menjaga lingkungan hidup untuk anggaran tahun 2024 bagaimana kemudian kita melibatkan masyarakat terutama skala pemerintahan yang paling rendah lah dalam hal ini desa. Tentunya dengan adanya *carbon trade* ini menjadi peluang ya karena paling tidak desa hari ini itu anggaran juga cukup besar. *Nah*, kalau kemudian ada program sosialisasi tentang *carbon trade* sampai ke pemerintahan terkecil dalam hal ini desa sehingga dia berpikir akan mendapatkan uang dari situ dengan kemudian melakukan pelestarian lingkungan ini menjadi peluang untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan kita.

Nah, ini saran saya bagaimana 2024 dibuat program kalau perlu memang ya kompetisi kalau kalpataru, *nggak* tahu kalpataru masih ya? itu kan di level kabupaten yang saya punya tetangga di Dinas Lingkungan Hidup, dia jarang tidur hanya di detik-detik mau penilaian kalpataru saja, yang sampahnya bau bagaimana, betul itu. Tetangga yang rumahnya persis dengan saya sehingga dia ngadu bagaimana kemudian dia dapat kalpataru itu prosesnya juga seperti roro jongrang begitu, tahu ya, ya orang roro jongrang di sulap semalam bisa kemudian penilai itu datang.

Nah, kita tidak menginginkan itu. bagaimana kemudian dilibatkan dari desa sosialisasi tentang *carbon trade* saya pikir kepala desa juga akan semangat kalau kemudian ada pendapatan yang bisa diharapkan untuk menambah PAD atau anggaran dari desa itu sendiri. Sementara untuk itu mereka ada, kan sekarang dana desa cukup tinggi, Bu Menteri. Ini mungkin perlu menjadi pemikiran.

Kemudian juga terkait dengan kebakaran hutan, saya ingin mendapatkan gambaran langkah antisipasi yang belum seperti apa ini kan menjadi *problem* utama kita. Yang sudah terjadi di Pulau Jawa paling banyak ini juga seperti apa sehingga apa ini tidak akan menjadi sebuah “bencana” untuk negara kita.

Demikian mungkin Pak Ketua, Pimpinan, dan Bu Menteri.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Selanjutnya, Pak Rudi dari Fraksi PAN.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan, Bu Menteri, Wamen, Sekjen dan Bapak-Bapak Dirjen, serta Eselon I,

Saya mengapresiasi di KLHK masalah tanggapan tentang polusi yang memang beberapa waktu yang lalu itu sangat menyita ya media di Indonesia yang akhirnya ada kesimpulan dari Bu Menteri bahwa awalnya itu dari tambang, dari kendaraan dan tambang.

Mungkin saya bisa memberikan masukan walaupun kondisi *finance*-nya tidak begitu maksimal di beberapa kota besar agar *monitoring spot* yang tentang polusi itu bisa diaktifkan kembali. Mungkin dulu ada, tetapi sekarang sudah tidak berfungsi sehingga masyarakat bisa menjadi seperti Sumatera Utara, Kalimantan, dan Sulawesi.

Bu Menteri, Pak Wamen, Sekjen, dan yang lain-lain.

Program Bang PeSoNa itu sangat bagus sekali yang disampaikan kepada masyarakat, kemudian kebun bibit rakyat, serta bibit produktif. Hanya saja bibit produktif kalau boleh saya memberikan masukan agar diberdayakan pengaduh atau penangkar lokal, karena hampir sama apa namanya mutunya dari pada yang

ada di Jawa, ada yang datang dari luar daerah tersebut. Kemudian celakanya kalau memang dari luar daerah yang apalagi yang sangat jauh itu sampai di daerah pemilihan kami khususnya di Nusa Tenggara itu sudah mungkin sudah, sudah mati gitu jadi tidak bisa ditanam kembali sehingga padahal di lokal itu mereka memiliki masyarakat yang memiliki usaha tersebut.

Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan agar anggaran di KLHK itu bisa ditingkatkan kembali walaupun kita tahu PNPB ini sangat besar sekali dan *alhamdulillah* dan mungkin untuk PNPB ini bisa di, ditingkatkan lagi atau bisa di apa namanya untuk tahun ke depan lebih maksimal lagi. Dan yang paling penting kami sangat menyetujui atau mengusulkan untuk penambahan anggaran di KLHK.

Saya kira demikian Bapak Ibu Menteri, Sekjen, dan Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Iya, sudah selesai pertanyaan dan tanggapan dari para seluruh fraksi dan mohon izin Ketua untuk pertanyaan dan tanggapan dari para Anggota.

Pertama, dari Pak Darori, silakan Pak.

F-P.GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Para Pimpinan, Bu Menteri, para Eselon I, Pak Wamen,

Saya hanya memberi masukan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua masalah mangrove, kita sangat serius Komisi IV, tapi mengundang bupati tidak diindahkan bahkan tidak menjawab, itu bagi saya sangat menyakitkan. Maka saran saya, Pak, Bu Menteri, tolong tugaskan Gakkum mohon didampingi oleh Bareskrim sama Kejaksaan Agung turun. Kalau itu kawasan hutan, itu Undang-Undangnya 41 Pasal 50 juncto 78, tapi itu di luar Kawasan, Ibu berwenang dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang 18. Bahkan saya sarankan pakai pasal pembiaran dimana seorang bupati yang biarkan ini kena 10 tahun, Bu, saya yakin mesti akan takut itu, ya. Kita institusi dihargai, tapi diundang *nggak* mau datang, ya. Turun bersama, kalau sudah tahap dari Bareskrim dan Kejaksaan Agung turun, dari Kejarinya sama Kapolresnya akan ikut gitu. Dan saya kira Pak Ketua, kita sependapat ini biar kita memberi pelajaran kepada kepala daerah seolah-olah tidak menganggap bahwa itu kuasa kita gitu. Itu yang pertama.

Yang kedua. Kemarin teman-teman menyampaikan sekarang daerah-daerah banyak monyet mengganggu baik ke rumah dan ke tanah-tanah pertanian

karena makanannya *nggak* ada. *Nah*, ini pengalaman kita dulu waktu Taman Nasional Merapi ke Solutigo itu orang pulang dari sawah mau makan nasinya udah *nggak* ada dimakan monyet gitu. Teman-teman kepala balai, Bu, udah menanam jambu biji Bu, alhamdulillah sekarang di sana sudah ada hutan jambu biji tolong ini ditingkatkan lagi kalau sudah ada di, diadakan lagi gitu. Ya, saya sarankan itu karena teman-teman banyak usul kemarin waktu pertemuan dengan Eselon I gitu.

Yang ketiga, soal kebakaran, Bu. Kalau sudah kebakar susah kita memadamkan, mohon ini ditingkatkan pengendaliannya dengan menambah masyarakat sekitar kawasan hutan mungkin bisa menggeser anggaran yang sudah ada. Ini yang perlu dilakukan ya, karena kalau sudah terbakar walaupun itu sebenarnya di luar kawasan ya tapi dari segi lingkungan mengganggu itu jadi tanggung jawab kita gitu.

Saya kira itu, Pak Ketua, masukan saya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan karena ini situasi yang sangat mendesak yang dihadapi pada saat ini.

Sekian, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Silakan, selanjutnya Pak Sunarna.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum):

Terima kasih, Pak.

Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Bu Menteri, Pak Sekjen juga seluruh Dirjen yang hadir pada kesempatan hari ini,

Tentu saya mengapresiasi seluruh kinerja dari Kementerian KLHK pada tahun ini yang selalu meningkat, meningkat dan cenderung membaik. Tapi bahwa suhu lingkungan kita itu naik terus juga Bu Menteri, apa tentunya perlu langkah-langkah yang tentu langkah percepatan yang perlu dilakukan termasuk ya mungkin di jalan-jalan sekarang itu kan panas sekali, Bu, gerakan itu kan penting, gerakan serentak, gerakan serempak untuk penghijauan mungkin sebentar lagi sudah mau musim penghujan.

Apalagi mungkin juga Jakarta polusinya juga luar biasa, apakah polusi itu juga semua hasil dari kendaraan semua saja. Jangan nantinya kendaraan hanya dipakai untuk alasan saja padahal mungkin polusi ditimbulkan dari hal yang lain mungkin yang lebih besar, karena kecepatan polusi dari Jakarta ini dalam 2 bulan, 3 bulan ini luar biasa bukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan

mungkin mobil setahun mungkin ya 10%, 15%, tapi apakah itu akan berpengaruh secepat itu, Bu Menteri, tentu ini menjadi pemikiran kita bersama.

Dan Bu Menteri, saya mohon seperti di lereng Merapi, Bu, Lereng Merapi di baik di Magelang, Boyolali, Klaten, itu banyak tambang pasir yang ilegal semua yang sangat luar biasa, Bu. Itu perlu penertiban tentunya, karena itu hampir ratusan bahkan dua ratusan tambang yang legal yang perlu ditertibkan karena memang sangat merusak sekali. Menyedihkan nantinya kalau sampai mata air-mata air di bawah itu di kaki-kaki gunung itu nantinya banyak yang mati di kemudian hari hanya karena pertambangan yang memang tidak terukur, pertambangan yang memang tidak bisa dikendalikan dengan baik.

Selanjutnya Bu Menteri, dulu dari masyarakat kami di Banyumas itu pernah mengajukan untuk perhutanan-perhutanan sosial dulu dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2001 tapi sampai sekarang tidak ada perkembangannya, Bu. Dulu saya pernah menyampaikan Pak Sekjen, tapi juga belum ada tindak lanjut. Sedangkan ada orang lain yang juga keluar izinnya, *nah* ini tentu konstituen saya *entar* pasti teriak Bu, Dapil saya adalah Banyumas, Cilacap, Bu.

Mungkin itu yang kami sampaikan, Pak Ketua. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bu Menteri dulu ajuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat yang ada di wilayah Banyumas.

Sekian terima kasih Bu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, sehat selalu semuanya dalam menjalankan tugas untuk bangsa dan negara kita.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Demikian pertanyaan, tanggapan, usulan dan saran dari Anggota Komisi IV.

Silakan, Ibu Menteri untuk menjawab.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya sudah mencatat dan mohon izin saya memberikan respon terhadap hal-hal secara *overview*, nanti secara detail saya kira tertulis.

Kami sangat menghargai saran yang sangat simpatik untuk kita sesungguhnya perlu mengawali secara lebih besar kampanye lingkungan. Memang di dalam subyek lingkungan, itu penyelesaiannya secara umum secara teori 2 hal. Pertama, kebijakan yang tepat, jadi insentif dan disinsentif. Lalu, yang kedua, kampanye publik. Jadi itu sebetulnya jalur-jalur itu yang kami coba ikuti saluran utamanya, tetapi tentu saja kerintilan pekerjaannya sangat banyak dan kita baru sampai seperti ini sekarang ini dan terima kasih kami akan mengambil langkah lebih lanjut tentang ini.

Kemudian tentang mangrove. Bapak, ini memang karena di waktu yang lalu mangrove itu mungkin, Pak, yang terhormat Pak Darori juga masih ingat hanya diatur dengan Perpres 45 tahun '90 kalau *nggak* salah ya Pak ya tentang kawasan lindung dan memang tidak, tidak terlalu mudah karena yang di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Tapi, saya kira tadi catatan yang terhormat Pak Darori dan Pimpinan Pak yang terhormat Bapak Sudin, saya kira ini akan kami tempuh.

Pertama, kami sudah mengusulkan kepada yang terhormat Bapak Presiden untuk memantapkan seluruh regulasi mangrove dengan Peraturan Presiden lagi, Bapak.

Terus yang kedua, saya setuju untuk dilakukan *second layer* penegakkan hukum. Jadi sekarang mungkin Dirjen Gakkum aja yang udah langsung turun Pak Roy, jadi ketika *layer* kabupaten *nggak* jalan, *layer* provinsi *nggak* jalan, maka *layer* berikut yang harus bisa jalan menurut Undang-Undang 32 itu bisa kita lakukan.

Kemudian untuk peningkatan dukungan bagi masyarakat seperti dana Bang PeSoNa dan juga untuk aktivitas kelompok di masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang aktif, saya sependapat dan memang rencananya dana tambahan nanti akan dialokasikan untuk yang kegiatan masyarakat. Tetapi yang terhormat Pak Ansi, sebetulnya kita sudah punya instrumen yang lebih bagus dari itu atau bisa paralel kita lakukan yaitu yang disebut dukungan dari Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Jadi, sudah ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang isinya menampung berbagai, jadi dia meng-*collect* dan menyalurkan dana yang bukan APBN. Jadi di keuangan *slot*-nya itu berasal dari filantropi dan lain-lain, dan ini berupa hibah misalnya dan lain-lain, ini bisa dipakai untuk *small grant*. Jadi, boleh untuk masyarakat, bisa juga dipakai untuk *small grant* yang didampingi oleh kelompok aktivis, bisa untuk investasi, bisa untuk *capacity building*, ini belum terlalu populer tetapi ini sudah bisa kita mulai.

Kemudian tentang dana alokasi khusus. Saya sangat sependapat dan sebetulnya itu termasuk kegelisahan saya juga bahwa harusnya DAK-nya KLHK

itu harusnya diatas 2 triliun gitu loh, ini kita cuma dapat 200 miliar lebih. Tahun-tahun lalu masih dapat 500-an miliar, Pak Ketua. Jadi, ini ternyata karena ada persoalan *menu* itu sebabnya mungkin di bagian satu, dua tahun terakhir ini kita perlu mempertajam soal *menu* tentang dana alokasi khusus. Karena memang saya sependapat sekali, misalnya beberapa provinsi kita yang pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama gila-gilaan investasinya kan korban lingkungannya kan juga gila-gilaan sekarang seperti Jawa Barat misalnya atau Sumatera Selatan atau Kalimantan Timur itu yang PJP I-nya dulu pembangunannya gede-gedeane akibatnya itu sekarang. Oleh karena itu, *menu* DAK perlu kita lakukan.

Namun demikian, sebetulnya beberapa provinsi yang jagoan hutan, itu punya yang disebut dana DBHDR/Dana Bagi Hasil Dari Reboisasi. *Nah*, ini, ini saya suka teriak-teriak ke daerah soal DBH ini untuk mendukung Karhutla. Tapi dengan perkembangan yang ada dan dengan apa yang dilihat secara langsung oleh yang terhormat Ibu-Bapak Anggota di lapangan, ini juga sebetulnya bisa kita dorong untuk DBHDR. Tentu yang punya banyak DBHDR ini yang provinsi-provinsi jagoan hutan, misalnya Kalimantan Tengah begitu.

Kemudian soal deforestasi. Kita Indonesia termasuk yang direkam dengan sangat baik oleh internasional tentang progres deforestasi kita. Kalau di awal tahun di atas 2 juta hektar dalam satu tahun, kemudian di awal *dua ribu*, di akhir 2013-2014 sampai dengan 600.000 lebih setahun hektar, sekarang kita udah tinggal 107.000 hektar dalam tahun 2022. Datanya lengkap, kemudian per provinsi juga ada, saya nanti akan berikan saja karena tiap tahun kita mengeluarkan data itu per provinsi. Kemudian kalau di identifikasi sebabnya apa *sih*? *Oh*, ini, ini apaan? data deforestasinya? yang paling gede disini angkanya masih Riau Pak Ansi 7000 hektar, kemudian Sumatera Utara 5.000, Sumatera Barat 5000-an lebih juga, Jambi, Sumsel udah sedikit, Babel sedikit, Bengkulu juga masih gede, Kalimantan Barat yang paling gede 7,8, jadi *nggak, nggak bener* juga bahwa dia di NTT, NTB gitu *nggak* juga.

Saya memang memperkirakan bahwa kan sebab, sebab Karhutla, sebab deforestasi itu yang paling gede itu kebakaran hutan dan juga perambahan. Tapi kalau kebakaran hutan di NTT atau NTB misalnya, dia hanya savana, kebakar dua hari udah gitu rumputnya hidup lagi untuk makanan ternak, jadi itu sebetulnya *nggak, nggak* bisa kita sebut deforestasi. Jadi, nanti datanya dan petanya kami kirimkan Bapak.

Kemudian tadi ditanyakan soal kasus dari hasil observasi kunjungan kerja yang terhormat Anggota Komisi IV DPR RI dan Pimpinan yang PT apa tadi Mulia dan lain-lain itu Mulia apa? Mulia Persada. Sekarang itu dia udah masuk di dalam mekanisme PP 24, jadi dia kena Undang-Undang CK Pasal 110B itu akan kena sanksi administratif dan lain-lain. Jadi artinya, dia berproses, Pak Ketua.

Kemudian tentang Kedap Sayaaq, itu juga terus diolah, dia juga berproses. Dari 217 miliar yang dia harus bayar, dia udah bayar 181 miliar, Pak Ketua, nanti data lengkapnya saya kira kami akan siapkan secara tertulis.

Kemudian tentang *carbon trade*. Saya sangat sependapat Bapak usulan ini dan ini memang sedang kita persiapkan. Ada beberapa mekanisme di *carbon trading* yang ada yang disebut mekanisme *result based payment*. Jadi kalau kita punya prestasi di dalam misalnya mengelola dengan baik, menanam dengan banyak dan sebagainya itu akan mendapatkan *reward* ya. itu yang kita sudah dapat sekarang dari Norway untuk 100 juta hektar lebih eh 100, 100 juta Dolar, US Dolar, kemudian itu di Kaltim. Kemudian juga ada yang di Jambi, itu ada data lengkapnya. Nah, jadi begitu prestasinya baik dapat dukungan dari World Bank, dari Global Climate Fund, dari kerja sama internasional itu akan kita bagi dananya, langsung ke KPH, ke masyarakat dan sebagainya. Ini udah ada berapa contoh-contohnya Bapak dan saya setuju bahwa ini memang sudah harus disosialisasikan supaya masyarakat ada harapan dan ada optimisme.

Kemudian tentang Karhutla, saya mohon izin melaporkan ringkas. Kondisinya memang biasanya saya selalu *deg-degan* di antara tanggal 6 September sampai dengan tanggal 16 September, itu pengalaman selama 8 tahun itu di antara tanggal itu main puncaknya. Dan kalau lihat sekarang datanya per tanggal 5 September jumlah *hotspot*-nya itu se-Indonesia kalau tahun lalu 979, tahun ini sudah 3788, jadi *hotspot*-nya naiknya tinggi.

Kalau di 10 provinsi rawan seperti Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Papua, itu tahun lalu dari mulai 1 Januari sampai tanggal 5 September tuh 441 *hotspot*, tahun ini di provinsi tersebut udah 2.608. Kebakarannya tiap hari kami kontrol itu rata-rata antara 2, 30 titik kebakaran, karena tidak semua *hotspot* adalah *firespot*. Tapi di sistem kita, ketika ada *hotspot* di tempat tertentu di Gakkum itu ada ininya ada *monitoring*-nya, ketika dia ada di areal konsesi langsung kita tegur. Ini ada *hotspot* sekian, kamu harus hati-hati atau kamu kena sanksi, gitu kira-kira mekanismenya di Gakkum seperti itu. Nah, catatan yang sekarang seperti kami laporkan di Raker yang lalu itu sudah 90.000-an hektar.

Yang sekarang kami justru ini sejalan sebetulnya dengan catatan dari BMKG, kita mewaspadai yang Pulau Jawa ya, Pak Bambang, ya. Saya hari ini ngejagain di Gunung Arjuna, sebelumnya beberapa hari kemarin di Sumbing, Merapi dan lain-lain, jadi ini kita terus ikutin. Tapi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, itu tetap juga masih ada, cuman ada yang baik sistem kerjanya udah cukup berjalan antara BPBD, BNPB, Pemda Provinsi, TNI, Polri, dan DAOPS Manggala Agni, jadi ini, ini terus-terusan berjalan. Kami juga membentuk namanya Eselon I Supervisi Wilayah, jadi misalnya Sekjen kontrol wilayah mana, Dirjen Planologi kontrol wilayah mana. Jadi kalau ada catatan *record* peristiwa, saya langsung minta tolong, Pak Dirjen tolong cek dan komunikasi dengan Pak Gubernur atau Pangdam atau Danrem atau Kapolda. Jadi

yang di Jawa memang sangat banyak terbantu oleh BPBD Provinsi Kabupaten dan Perhutani, sebab yang KLHK dari dulu-dulunya lebih banyak ke yang keluar yang tadi saya sebutkan yang 10 provinsi.

Kemudian saya juga berterima kasih catatan bahwa untuk kita menjaga iklim kita penghijauan, penanaman itu menjadi kunci, kita memang sudah punya formatnya untuk menjaga iklim ini dengan yang disebut agenda *Forest and Other Land Use Net Sink 2030* itu kita jagain. Memang dalam waktu dekat dan memang sudah sesuai arahan yang terhormat Bapak Presiden bahwa untuk case yang sekarang saya harus segera dilakukan penanaman Jabodetabek, ini juga kami sedang menyiapkan ini di lapangan.

Dan terhadap catatan-catatan tadi apa PSKL untuk Banyumas, Pak Dirjen Bambang ya, kemudian juga TORA, Pak Hanif ya untuk NTT, dan lain-lain. Dan juga tadi yang Merapi, Pak Satyawan, Prof Satyawan ya Dirjen KSDAE ini nanti yang spesifik-spesifik case wilayah, kami mohon izin untuk melaporkan secara lengkap tertulis.

Demikian Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota yang kami hormati.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas jawaban dan responnya.

Cuma ini ada beberapa catatan mengenai Rempang tadi, apa yang dikatakan oleh Pak Darori mengenai ya bupati kita panggil *nggak* datang, walikota *nggak* datang ya kan. Jadi, Pak Roy setuju untuk mengirimkan tim ke sana ya, masukkan ke dalam kesimpulan rapat membawa Kepolisian, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya. Kita mengacu pada Undang-Undang nomor 41 dan Undang-Undang Nomor 32/2009.

Kita bicara masalah Batang. Sebelum belerang itu dibuat, pada tahun 1986, tidak pernah ada pembalakan atau apapun di sana perambahan hutan, *nggak* ada. Namun, setelah jadi ya banyak mulai perambahan-perambahan, catatan saya jelas sekali di sini. Setelah disegel beberapa kali tidak ada tindak lanjutnya baik itu oleh LHK maupun oleh Pemkot Batam maupun Pemkot Kepulauan Riau. Penguasaan itu kan bukan ilegal itu bukan oleh pengusaha tapi oleh pengusaha, oleh cukong, oleh masyarakat, dianggapnya ini lahan, lahan kosong, bisa untuk apa saja dengan statusnya kita jelas ya statusnya adalah hutan buru, hutan lindung, dan lain-lain. Hal ini tidak bisa diabaikan maupun dibiarkan, segel langsung tuntutan ke tingkat hukuman gitu. Karena kalau saya lihat ini kan, ini ada oknum juga baik di LHK, di lapangan, maupun oknum di otorita Batam, Pemkot, Pemprov yang melakukan tutup mata atau pembiaran seolah-olah saya tidak tahu gitu.

Ini ada juga, Bu Menteri, ya yang mengaku-ngaku sudah memegang izin petambak udang, peternakan, di atas kawasan hutan buru maupun hutan lindung, ini kan *nggak* boleh gitu. Jadi semua ini harus dibongkar oleh Gakkum, jadi kalau Gakkumnya *nggak* berani, lemah ya susah juga tidak ada penegakkan hukum. Kalau memang melanggar ya, kita segel lagi semuanya, langsung tindaklanjuti ke pengadilan.

Bu Menteri, saat ini saya mendengar BP Batam sedang melakukan pelepasan kawasan hutan HPK menjadi APL. Jadi kalau tidak ada penertiban dan penyuluhan yang serius pasti akan menimbulkan konflik yang baru, si A boleh saya *nggak* boleh, si B didiamkan kok saya disikat, ini dibiarkan didiamkan, ini yang paling penting. Jadi, Komisi IV memandang perlu ketegasan, tidak peduli dari perusahaan maupun perseorangan maupun oknum. Pasti kan di sana kan saya juga mendengar *kok, wah* perusahaan ini punya dibelakangnya ini, *wah*. Sampai Pak Roy dibilang, Pak di sini bintangnya lebih dari satu, Pak, *backing*-nya. Wah, Pak Roy menjawab, saya bintang tiga kata Pak Roy. Kalau Komisi, Ketua Komisi bintang empat atau bintang tujuh katanya kan gitu kan. Betul kan? ada yang begitu kan Pak, iya kan? itu yang terjadi.

Jadi, ya kita lihat, Panglima TNI, Presiden, Kapolri, yang lain-lain itu menanam mangrove, menjaga hutan. Saya yakin para pimpinan di atas itu kalau melihat anak buahnya bertindak melindungi oknum yang membuat kejahatan lingkungan, saya yakin mereka pasti akan disanksi oleh atasannya tersebut. Jadi, beberapa butir tadi tolong dimasukkan ke dalam kesimpulan rapat, Pak Aldi. Ya, Bu ya, karena BP Batam itu kan sama walikota jadi satu *toh?* Walikota *ex officio* menjadi Ketua Otorita Batam. Ya, mungkin walikotanya kita berpikir positif lah, walikotanya *nggak* tahu menahu, tetapi di bawahnya kan.

Seperti yang kemarin yang dicabut izinnya Golden Best, tiba-tiba pemilik Golden Best *ngoceh* di mana-mana, siapa berani nyegel saya. Kemudian dipasang plang Otorita Batam, dalam proses pelepasan HPK menjadi APL, betul Pak Dirjen? Saya minta plang ini dilepas, tidak ada, tidak ada kawasan tetap masih HPK. Jadi nanti di dalam, dalam itu, dalam kesimpulan dimasukkan aja Pak Aldi ya. Kalau *nggak* nanti kacau semua ini, ya.

Ada lagi Anggota?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya. Pak Ansi, mau ngomong?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Iya.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Saya mau respon yang dijelaskan oleh Bu Menteri tadi menjawab pertanyaan dan catatan dari fraksi dan juga Anggota.

Tadi Bu Menteri menyinggung soal dana-dana filantropi yang bisa kita gunakan untuk kerja-kerja konservasi. Tentu itu baik Bu Menteri sebagai suatu bentuk kepedulian dan perhatian dari pihak-pihak non-negara atau *non-state actor*, tetapi tingkat kepastiannya itu kira-kira seperti apa Bu? Karena kalau bicara dana filantropi itu kan berpulang kepada kesadaran *non-governmental organization* atau pun juga *non-state actor*, tidak ada keharusan atau kewajiban. Sementara dalam konteks diskusi kita dalam Raker ini kan kita berharap ada alokasi anggaran yang ditingkatkan terkait dengan hal itu, Bu Menteri.

Yang kedua. Saya ingin bertanya soal *carbon trade* atau jual beli karbon lebih khususnya yang dilakukan oleh pihak swasta, Bu. Itu apakah hari-hari ini sudah berjalan atau sudah ada yang melakukannya atau memang belum ada, kalau sudah ada apakah perangkat hukumnya itu semuanya itu sudah dipenuhi dan mekanisme perdagangan karbon oleh pihak swasta ini seperti apa, Bu?

Yang ketiga, terkait dengan penurunan status hutan lindung menjadi Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Timur. Ini di Dapilnya Pimpinan saya Pak Budi Djiwandono *nih*, Pak Budi *proficiat ya?* pelaksanaan FIBA ini luar biasa. Jadi, kami dengar, Bu karena pengajuan RTRW itu beririsan dengan habitat kehidupan Badak Sumatera yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kami ingin mendapatkan pencerahan dari Bu Menteri terkait dengan hal ini, apakah betul yang kami dengar itu terganggu karena adanya RTRW baru, adanya status hutan lindung yang diturunkan menjadi hutan produksi. Dan kalau betul, apakah mungkin, Bu, harusnya hutan lindung itu ditingkatkan justru menjadi hutan konservasi sebagai bentuk keberpihakan kita untuk menjaga kelangsungan hidup Badak Sumatera yang ada di Kalimantan Timur.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri, mau direspon?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin menegaskan bahwa tadi saya menyebutkan dana BPDFH itu antara lain sebetulnya filantropi, tapi dana World Bank, dana Norway, dana filantropi yang udah masuk misalnya dari Ford Foundation dan lain-lain, itu dia semacam *trust fund* jadinya. Ya, perkiraan saya ya dan saya mendukung kalau kita akan paralel bareng-bareng yang APBN ya terus, yang sana juga bisa terus, saya kira *nggak* ada masalah, Pak Ketua. Malahan bagus sebetulnya kalau bisa KLHK dapat 15 triliun tiap tahun malahan banyak yang bisa kita beresin gitu.

Kemudian soal karbon, inilah yang sudah...

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

Pak, izin Pak Ketua.

Tadi mengenai dana-dana hibah itu.

KETUA RAPAT:

Nanti, Bu Endang.

Dijawab dulu Pak Ansi, baru Bu Endang bertanya lagi. Sebentar, tenang aja, Bu. Tadi kan kita bilang jam 4, Bu, tenang, Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Terima kasih, Pak Ketua.

Tentang *carbon trading*, ini, inilah yang sebetulnya sudah secara bertahap kami melaporkan di Komisi IV tentang perdagangan karbon. Kalau, kalau peristiwanya itu udah ada sejak tahun 2011, Pak Ansi, karena kan tentang ini sejak zaman apa namanya Kyoto Protokol sampai kemudian di *adjust* di Paris Agreement di tahun 2015 dan sebagainya, baru kan kita juga punya Undang-Undang 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Iklim.

Jadi, sebetulnya kejadian-kejadiannya sudah, sudah ada sejak tahun 2011. Tapi ada tapinya, dengan Undang-Undang Dasar kita, dengan undang-undang yang kita miliki tentang sumber daya alam, dengan perkembangan dari negosiasi-negosiasi di UNFCCC protokol internasional, kita kan harus menyesuaikan. Maka, sudah keluar Perpres 98 Tahun 2020 apa 21? 2021, Perpres 98 itu tentang Nilai Ekonomi Karbon. Waktu itu disebut Nilai Ekonomi Karbon karena karbon *pricing*

sebetulnya menilai, memberikan penghargaan kepada karbon begitu. Jadi, perdagangan karbon itu hanya bagian dari pada pengaturan tentang nilai ekonomi karbon.

Nah, di dalam Perpres ini dikatakan bahwa terhadap perdagangan-perdagangan yang sudah terjadi harus dilakukan penyesuaian gitu. *Nah*, termasuk terhadap perusahaan-perusahaan kehutanan yang sudah melakukan ini dengan transaksi sampai triliunan rupiah dan kita kenakan sanksi dan lain-lain, *nah* ini yang termasuk sekarang dalam proses *adjustment*. Dan selain Perpres 92, sudah ada Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang, tentang apa Bu Ami? Tata Laksananya, tata laksana dari Perpres 98. Kemudian sudah ada juga peraturan yang parsial dari Menteri ESDM untuk ngatur yang di sektor energi, karena kan karbon kita itu 60% datang dari sektor kehutanan, 59, 60%, 37% dari sektor energi, jadi energi juga bekerja keras untuk ini.

Nah, kita sekarang sudah punya Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Karbon Hutan, gitu Pak Ansi. *Nah*, kalau ditanya sekarang perdagangannya sudah seperti apa? sudah keluar juga peraturan OJK tentang Bursa Karbon, *nah* itu sudah keluar juga. *Nah*, jadi kalau ditanya sekarang perdagangannya sudah terjadi seperti apa? kalau yang transaksi dalam negeri...

KETUA RAPAT:

Jadi nanti kalau ada yang mau menjual itu masuk bursa dulu karena udah ada OJK tadi?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Nggak selalu, tidak selalu. Bisa langsung juga, Pak Ketua, terutama yang dalam negeri.

KETUA RAPAT:

Kalau *nggak* langsung monitornya gimana?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Ada sistem *registry* nasionalnya. Ada mekanisme-mekanisme.

KETUA RAPAT:

Oh. Terus OJK fungsinya apa?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Untuk mengatur perdagangannya yang terutama internasional yang lewat bursa, jadi diberi ruang untuk.

KETUA RAPAT:

Oh, gitu. Iya, paham, paham, saya paham.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Jadi dua jalur Bu ya? perdagangannya itu lewat dua jalur tadi ya, bisa langsung dan bisa lewat.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Bisa Pak Ansi, terutama yang dalam negeri. Saya kira kalau yang dalam negeri mungkin sudah bisa apa saling berkomunikasi, misalnya Pertamina sama Perhutani misalnya gitu, kayak gitu-kayak gitu udah, udah bisa. Sekarang yang sedang disiapkan adalah perdagangan karbon luar negeri, *nah* karena mis yang terjadi di ruang publik bahwa dagang karbonnya boleh deh swasta, sini langsung ke swasta internasional. *Nah*, itu yang *nggak* boleh, karena kita *nggak* bisa *record*, kita *nggak* bisa kontrol, lalu suhu udara kita nanti bagaimana misalnya seperti itu. Jadi, gambarannya seperti itu.

Kalau yang Kalimantan Timur di Raker yang lalu sudah pernah ditanyakan dan prinsip tidak ada, paling tidak sekarang sedang dalam kajian, Pak Ansi. Jadi yang 700.000 itu masih usulannya Kalimantan Timur yang kita sedang pelajari.

KETUA RAPAT:

Hanya baru usulan? jangan-jangan di sana sudah di kavling-kavlingin oleh yang di sana.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Nanti kita kontrol bareng aja, Ketua.

KETUA RAPAT:

Tolong nanti setiap itu dilaporkan, Bu Menteri.

Bu Endang jadi nanya? tadi dijelasin lagi tidur.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

Nggak, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

Jadi, izin tadi Bu. SOP-nya itu bagaimana untuk yang *grant*, tadi Ibu kemukakan. Nah, apakah ada *gearing ratio* antara APBN dengan *grant* atau sendiri-sendiri.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Kelihatannya apa longgar ya *nggak* ada, *nggak* ada, bisa paralel Bu Endang *nggak* masalah. Jadi, artinya kalau aktivis misalnya *NGOs*, *CSOs* itu berinteraksi langsung dengan BPD LH itu udah terjadi juga *nggak* ada masalah, jadi bisa.

KETUA RAPAT:

Mau ngomong? tadi katanya izin mau pulang.

F-PG (RAVINDRA AIRLANGGA, M.S.):

Jam 5.30.

KETUA RAPAT:

Oh, 5.30. Ya udah, ngomong.

F-PG (RAVINDRA AIRLANGGA, M.S.):

Ternyata, ternyata lebih cepat.

Izin Ibu.

Bu Menteri beserta jajaran Eselon I,
Rekan-rekan Komisi IV yang saya banggakan,

Ingin bertanya, terkait *carbon trading*. Satu. Sudah ada beberapa pihak yang sudah terdaftar di Verra dan Gold Standard. *Nah*, apabila mereka sudah

melakukan perdagangan lintas negara menggunakan standar internasional, apakah mereka harus teregistrasi kembali di SRN dan bagaimana mekanisme transisinya.

Kedua, tadi pagi ada rapat ASEAN Communitie, dinyatakan bahwa *food loss and food waste* selama periode 2000 sampai 2019 mencapai 150 sampai 144 kg per kapita dan apabila dikelola dengan baik menurut Bappenas bisa memberikan akses makanan atau akses pakan ke 30 sampai 40% populasi. Dari saat ini dari sampah yang tidak terkelola itu 40% berasal dari sisa makanan, apakah bisa ada *recovery* dari sisa makanan ini, mulai program *food bank* atau program pemilahan di awal di dalam rumah tangga. Apakah insentif atau disinsentif yang bisa mendorong perubahan perilaku semacam ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Memang anak Ketum luar biasa, ternyata pemain karbon juga.

Kalau masalah tadi *zero waste food* itu sudah ada pembicaraan awal antara Badan Pangan Nasional dengan kita-kita bahwa mereka mengusulkan ada undang-undangnya agar jangan kalau makan ngambil terlalu banyak. Jadi, kalau orangtua saya mengatakan kalau ambil nasi setengah dulu, kalau kurang baru bertambah. *Nah*, dulu kalau saya beda melakukannya, saya makan nasi setengah piring, nambahnya satu piring Bu, maka jadi gemuk.

Nggak ada lagi?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Pak.

KETUA RAPAT:

Apa lagi?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Terakhir.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Baik.

Tadi penjelasan jawaban Ibu Menteri sudah kita pahami masalah Kedap Sayaq, Ketua berarti sudah ada pembayaran. Namun, yang PT satu lagi PT Mulia Persada Kartanegara ini nampaknya belum mungkin, mungkin belum lengkap bahan atau bagaimana atau alangkah baiknya kita panggil saja lagi, Ketua. Itu yang pertama.

Yang kedua, mendengar penjelasan Ibu tadi, ada bantuan-bantuan luar negeri ya, Pak, ini untuk bisa menjaga hutan Bu khususnya taman-taman nasional. Saya bingung Bu.

KETUA RAPAT:

Khususnya Gunung Leuser gitu ya?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Iya. Ini *ndak* ada bantuan.

KETUA RAPAT:

Oh.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Nah, mungkin karena jauh, Bu. Ibu katakan, Ibu katakan tadi sangat spesifik, lengkap ini, lengkap itu, cuma apa yang Ibu bantu? Kalau Taman Nasional Gunung Bromo itu udah bagus semua, Bu. Kalau di sana menggelontorkan uang 5 miliar saja Ibu takut, namanya kita mau menjaga, ya kalau dari APBN mungkin tidak mampu. Sekarang Pak Ketua kan masalah kemauan, kemauan Kementerian lingkungan hidup itu untuk menyelamatkan Taman Nasional Gunung Leuser. Kalau masalah yang dipertanyakan Ibu Endang tadi uang apa rutin-rutin itu masalah gelek itu, Ketua. Ini untuk menyelamatkan taman nasional tersebut yang tidak ada perhatian.

Itu aja, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Perhatiannya ada Bang, cuma sedikit, tidak cukup ya. Tadi mengenai PT apa tadi? Usulan Abang dipanggil ya silakan dipanggil karena kan waktu itu saya *nggak* ikut, saya *nggak* mimpin ke sana ya.

Kemudian lagi yang terakhir, Pak Hanan pernah dengar *nggak* tahun 2021 sampai 2022 ini di wilayah Lampung tempatnya Pak Hanan itu ada rehabilitasi mangrove Way Seputih dan Way Kambas, pernah dengar? Di belah mana? Pantai Timur. Sekarang Way Kambas itu kan masuk kawasan, kenapa *nggak* harus di luar kawasan seperti tempatnya Pak Hanan Kuala Penet, iya kan? itu hancur total itu. Mungkin waktu Ibu Menteri tugas di Lampung, jalanan di sana masih tanah Bu, sekarang udah aspal mulus. Dulu mungkin abrasinya hanya sedikit, sekarang mungkin 3, 4 kilometer menghantam daratannya karena mangrove-nya sudah dihabiskan semua. Jangan sampai taman nasional melalui BPDAS menanam mangrove di sana, kemudian BRGM juga di sana juga, jangan sampai ada indikasi seperti ini, ya.

Kalau sudah cukup, kita akan segera mengambil kesimpulan rapat.

F-PG (ALIEN MUS):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (ALIEN MUS):

Saya berharap apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi tentang penjelasan perusahaan-perusahaan yang telah ber- maksudnya bermasalah dan mendapatkan kunjungan spesifik oleh Komisi IV ditindaklanjuti. Saya juga sudah melihat beberapa perusahaan yang disampaikan oleh KLHK melalui *Whatsapp*, tapi ini benar-benar dari situsnya KLHK tentang perusahaan-perusahaan yang belum mewajibkan di membayar.

KETUA RAPAT:

PPKH.

F-PG (ALIEN MUS):

PPKH. Itu harus udah ditindaklanjuti, kalau memang ada pelanggaran ya harus ditindaklanjuti juga. Terus terang Bu Menteri karena memang kita mau untuk bilang mengejar PNBP, ya dari sini.

Kemudian Pak Roy, saya juga merasa bahwa tugas dan pengawasan Pak Roy ini sungguh sangat luar biasa. Walaupun kadang di lapangan kita sudah dapat, kita udah tindaklanjuti, Pak Roy juga dengan KLHK sudah melakukan aktivitas yang begitu luar biasa, tapi nanti di jejal lagi oleh pihak hukum yang lain. Tapi saya juga berharap Pak Roy harus tetap semangat, karena memang banyak

sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan. Apalagi ini sekarang Pak Hanif ini ya, Pak Dirjen baru ini ya. Kita kayaknya harus banyak-banyak koordinasi karena banyak sekali pelepasan IPPKH ini memang terjadi pelanggaran, tolong ini juga dilihat.

Pak Ketua, karena memang mau turun ke Maluku Utara, tapi karena jauh. Sekarang ada demo besar-besaran di Maluku Utara tentang pencemaran lingkungan di perairan Sagea yang kemarin saya tunjukkan pada RDP Bu, Bu Menteri, iya itu di Bokimaruru, kemungkinan besar itu diakibatkan oleh pencemaran yang dilakukan oleh pertambangan. *Nah*, ini juga menjadi atensi kami. Bu Vivien, mungkin bisa turun ke sana, saya akan kirim titik lokasinya dan dampak lingkungannya seperti apa.

Kemudian saya juga hari ini dikirimkan juga dari Pulau Obi, *nah* di sana juga ada pencaplokan tanah oleh salah satu perusahaan pertambangan, nanti saya kirim juga lokasinya di mana. Masyarakat sangat sedih sekali karena tiba-tiba tambang itu beroperasi di tanah mereka tanpa sepengetahuan dan pelepasan, Ketua, ini yang menjadi bingung juga masyarakatnya. Apakah Amdal itu sudah dilakukan sebelum IPPKH-nya ini keluar ataukah ada lagi permainan-permainan yang kita tidak tahu. Ini di Obi, Ketua, yang bupatinya kemarin datang di sini ngelapor di Halmahera Selatan.

KETUA RAPAT:

Gini aja, kita singkat aja. Pertengahan bulan kita kunjungan spesifik ke sana, kalau memang terjadi pelanggaran kita segel, udah. Segel, kemudian ditindaklanjuti oleh dilaporkan dari Gakkum ke aparat penegak hukum ya.

Inhutani ada yang mau *eh* Perhutani ada yang mau disampaikan sebelum kami menutup. Inhutani?

Dari beberapa dialog, diskusi, masukan. Kami akan menyampaikan kesimpulan Rapat kerja hari ini.

Silakan Pak Budhy yang kiri atau kanan sama aja.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Iya. Baik, Pak Ketua.

Rancangan kesimpulan:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA tahun 2024 sebesar Rp7.648.615.254.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.0402/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu

Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dengan komposisi per Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp449.809.277.000,00;
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp73.672.711.000,00;

KETUA RAPAT:

Minta tolong, para Eselon I perhatikan angkanya. Kalau memang tidak pas langsung disampaikan.

Lanjut, Pak Budhy.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar Rp300.881.069.000,00;
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebesar Rp1.357.357.741.000,00;
- e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1.748.497.174.000,00;
- f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp716.010.354.000,00;
- g. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp273.769.882.000,00;
- h. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM sebesar Rp373.822.575.000,00;
- i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp311.465.933.000,00;
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp498.814.150.000,00;
- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp353.834.443.000,00;
- l. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun sebesar Rp274.400.985.000,00;
- m. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp595.299.740.000,00;
- n. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp320.979.220.000,00.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disinkronisasi.

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Setuju, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pagu anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2024 sebesar Rp169.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DAK Fisik Bidang Kehutanan untuk mendukung tematik pengembangan *food estate* sebesar Rp34.500.000.000,00; dan
 - b. DAK Fisik bidang Lingkungan Hidup untuk mendukung tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sebesar Rp135.000.000.000,00.

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Setuju, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

3. Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan penambahan pagu anggaran tahun 2024 kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung program-program prioritas nasional.

KETUA RAPAT:

Jadi apabila nanti penambahan pagu anggaran ini diberikan, pesan saya bantu lah taman-taman nasional, ya Sekjen. Ini jangan nanti taman-taman nasional ini saya katakan kayak zaman Belanda masih pakai, itu tanya Dirjen KSDAE ke Baluran ya? udah mulai kebakaran Baluran? belum.

DIRJEN KSDAE (Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut, M.Agr.Sc):

Udah, Pak.

KETUA RAPAT:

Nah, kemudian Gunung Bromo?

DIRJEN KSDAE (Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut, M.Agr.Sc):

Bromo udah padam.

KETUA RAPAT:

Nah, iya udah padam. Besok cari pohon yang agak besar, yang agak gedean untuk daunnya untuk matiin apinya.

Dengan poin 3, Anggota setuju?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Setuju, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

4. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut semua perizinan berusaha pemanfaatan hutan mangrove yang telah diterbitkan oleh kepala daerah, yang tidak sesuai dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kejaksaan Agung RI dan Badan Reserse Kriminal Polri melakukan penegakkan hukum terhadap semua pihak yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Ketua, boleh *nggak* ditambahin diujungnya sesuai peraturan perundangan.

KETUA RAPAT:

Boleh *dong*.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Terima kasih, Ketua. Sebab ada prosedurnya, ada mekanisme.

KETUA RAPAT:

Jadi penambahannya, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. *Gitu* kan? peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Iya? Setuju pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Karena sudah mau jam 4, nanti jalan ditutup katanya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menelusuri pihak-pihak menguasai lahan dan yang mengaku memegang izin tambak dan/atau peternakan pada kawasan hutan baik dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, maupun instansi berwenang lainnya untuk disampaikan kepada publik demi menjaga kelestarian kawasan hutan.

Kok, agak *nggak* enak ya.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

Ketua, Mestinya tidak hanya Riau Pak, jadi *nggak* usah di. Kan sebetulnya hampir di seluruh Indonesia.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Baik dari Balai, Balai KSDA Riau.

KETUA RAPAT:

Tadi yang di atas sudah ada, Bu Endang. Seluruh Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, ya.

Ini harus disampaikan *time limit*-nya sampai kapan? Selambat-lambatnya 2 minggu? Kalau 2 bulan udah kelamaan Pak Roy, orang Pak Roy selama ini sudah tahu kok masalahnya dimana, siapa yang meramba, siapa yang *backing*. Kalau perlu tambahan data, saya kasih lagi datanya, saya data saya cukup lengkap loh.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Sebulan *deh*, Ketua, sebulan.

KETUA RAPAT:

Oke, selambat-lambatnya 30 hari. Jadi kalau perlu data nanti tinggal minta ke saya, saya kirim datanya. Ya. setuju, pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Setuju, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Jadi rancangan kesimpulan ini sudah selesai.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua, boleh saya sedikit, satu menit.

KETUA RAPAT:

Iya, boleh karena anda fraksi pemerintah.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Terima kasih, Pak Ketua.

Ibu Menteri, saya reses kemarin itu keliling ke Dapil jalan bersama Pak Suharyono, Sekretaris Dirjen. Kita ke KSDA, kita ke Cagar Alam Mutis melihat dan yang saya mau minta tolong ini satu Bu. Itu di sana ada satu kawasan namanya Fatuulan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, itu kawasannya hutan lindung tapi indah sekali, Bu, di ketinggian indah sekali. Masyarakat situ tanya ke saya, Pak Ansi ini banyak orang datang foto di sini ada potensi pariwisata skala terbatas. Pertanyaan mereka, apakah boleh masyarakat di situ mengajukan dan mendapatkan izin penggunaan hutan lindung itu untuk pariwisata terbatas skala situ Bu Menteri?

Demikian.

Terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Terima kasih.

Iya. Iya, jadi boleh, bisa lewat PBPH usaha, bisa juga lewat kelompok masyarakat. Jadi mana aja skemanya yang dipilih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Terima kasih, Bu Menteri.

KETUA RAPAT:

Jadi kemarin, Dirjen KSDAE *ngomong* Arafuru sudah bagus Pak Ketua, tapi sampaikan ke Ibu Menteri kalau sudah bagus anggarannya jangan dipotong lagi katanya. Justru kalau yang sudah bagus itu harus ditambah.

Sebelum kami menutup rapat kerja ini, kami persilakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja hari ini.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (PROF. Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc):

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,

Saya atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas interaksi dalam rapat kerja hari ini. Dan semua catatan yang sangat baik kami *record* untuk kami tindaklanjuti bagi kepentingan penyelesaian persoalan-persoalan lingkungan hidup dan kehutanan.

Terima kasih Ibu dan Bapak Anggota serta Pimpinan yang kami hormati. Sekian.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja kita pada hari ini yang cukup singkat namun padat dan terukur. Jadi, yang penting arahnya jelas APBN-nya untuk kepentingan rakyat.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV, mohon maaf apabila kami memimpin ada kekurangan, kekhilafan.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbil'alamin*, rapat kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIB)
(KETUK PALU 3 KALI)**

a. n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

ULFA NURFAJAR, S.E., M.A.B.
NIP. 197401251993022001